

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Bab I Pendahuluan ini dibahas beberapa hal sebagai berikut: a) Latar Belakang, b) Rumusan Masalah, c) Tujuan Penelitian, d) Batasan Masalah, e) Manfaat Penelitian, f) Penegasan Istilah.

A. Latar Belakang

Pada era ini “korupsi merupakan masalah paling krusial yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana korupsi yang terjadi terentang mulai dari korupsi kecil-kecilan sampai korupsi besar-besaran” (Montessori, 2012:293).

Tindak pidana korupsi kecil-kecilan seperti pemberian uang pelicin ketika berurusan di kantor kelurahan, hingga korupsi yang jumlahnya merugikan triliunan rupiah uang negara seperti kasus korupsi KTP elektronik yang menyebut kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun (kompas.com, diakses pada 13 April 2018).

Korupsi di negara Indonesia tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan sebagainya. Kabupaten – kabupaten di Indonesia tidak luput dari tindak pidana kasus ini, salah satunya adalah Kabupaten Lamongan. Tidak sedikit kerugian yang dialami negara dengan adanya kasus korupsi di Kabupaten Lamongan. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Lamongan dimulai dari hal-hal kecil seperti pungutan liar sampai kasus-kasus besar yang melibatkan oknum-oknum tertinggi birokrasi Lamongan

Layaknya yang diketahui Tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Lamongan beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap enam (6) orang beserta barang bukti berupa uang sekitar 466 juta dan

sejumlah dokumen (memo-x.com, diakses pada 13 April 2018). Kasus dugaan korupsi berjamaah dana desa (DD) di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang mana seorang oknum kepala desa terlibat dalam kasus tersebut.

Kasus lain adalah dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012 hingga 2016, sebesar Rp 1 miliar yang dilakukan oleh Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Disdik) Propinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Lamongan (faktualnews.co, diakses 13 April 2018).

Dua kasus di atas dapat menjadi referensi bahwa kota / kabupaten di Indonesia tidak lepas dari tindak pidana kasus korupsi dengan berbagai nominal yang merugikan negara, dan juga tersangka yang terdiri dari berbagai kalangan. Negara Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi gawat korupsi, yang tentunya akan berdampak buruk bagi kestabilan finansial negara Indonesia sendiri.

Menurut Sutandyo Wignyosubroto dalam Loso (2010:145) korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sudah menjadi kebiasaan dan budaya masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena semenjak jaman penjajahan Belanda korupsi sudah ada. Oleh karena itu, “kejadian ini makin mempertegas anggapan bahwa korupsi sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia” (Montessori, 2012:293).

Maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia menyebabkan kerugian besar bagi Negara Indonesia sendiri, jika tindak kejahatan korupsi ini tidak diberantas secara tuntas mulai dari instansi bawah sampai instansi atas perekonomian Negara akan menjadi tidak stabil bahkan runtuh. Maka dari itu, upaya-upaya tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan secara gencar, pendidikan antikorupsi harus diajarkan kepada generasi bangsa mulai dari pendidikan keluarga sampai pendidikan formal dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan

Tinggi (PT), sehingga sejak usia dini sudah tertanam akan bahaya tindak kejahatan korupsi bagi diri sendiri dan masyarakat.

Menurut Jatman dalam Loso (2010: 145) pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan dengan menciptakan sebuah budaya baru yang tidak korup dan kreatif. Ilmuwan, intelektual, budayawan, seniman, bisa mulai menciptakan budaya tersebut. Untuk mencegah kolusi dan korupsi diperlukan kesadaran untuk menempatkan kepentingan umum (kepentingan rakyat banyak) diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Menurut Lopa dalam Loso (2010: 145) juga mengatakan bahwa betapapun sempurnanya peraturan kalau niat korupsi tetap ada di hati yang memiliki peluang melakukan perbuatan tercela tersebut, korupsi akan tetap terjadi. Sehingga faktor mental yang paling menentukan.

Usaha pencegahan patut dilaksanakan, selain melakukan upaya pemberantasan korupsi,. Menurut Hassan, salah satu usaha yang dilaksanakan untuk menanamkan *mindset* atau pola pikir, sikap, serta perilaku antikorupsi melalui sistem pendidikan di sekolah, karena pendidikan di sekolah adalah merupakan salah satu proses pembudayaan (Harmanto & Danial, 2012: 157).

Pendidikan di sekolah sendiri memiliki peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Harmanto & Danial (2012:157) menyebutkan “sekolah sebagai lingkungan kedua bagi siswa dapat menjadi tempat pembangun karakter dan watak”.

Pendidikan antikorupsi dianjurkan masuk dalam kurikulum sekolah walaupun tidak berdiri sendiri, pendidikan antikorupsi dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran yang mengedepankan aspek moral. Zuriah (2015: 22) menyebutkan “pendidikan moral adalah suatu program pendidikan (sekolah dan luar sekolah) yang mengorganisasikan dan ‘menyederhanakan’ sumber-sumber moral dan disajikan dengan memperhatikan pertimbangan psikologis untuk tujuan pendidikan”. Selanjutnya dijelaskan pula “seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan aturan dan moral yang dianggap baik pada saat itu harus dihukum” (Zuriah, 2015: 22).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang berisi pendidikan moral dapat berintegrasi dengan pendidikan antikorupsi, sejauh ini diketahui bahwa dalam Pendidikan Kewarganegaraan mengedepankan aspek-aspek yang telah disebutkan di atas.

Bahkan Zuriah dalam Harmanto dan Danial (2012) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi alat atau instrumen paling fundamental di dalam bingkai pendidikan nasional sebagai media pembentukan karakter.

Pendidikan Antikorupsi diperlukan dan sebetulnya telah menjadi bagian dari pendidikan nasional Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 22 dan No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Montessori (2012: 294) menyebutkan “dalam permendiknas tersebut dinyatakan bahwa pengembangan sikap dan perilaku antikorupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)”.

Peran dari seorang pendidik juga patut diperhitungkan, khususnya dalam hal ini adalah guru PPKn. Guru memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Mulyasa (2007:37) menyebutkan “guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin”. Untuk itu seorang guru harus memiliki standar kualitas tinggi guna menunjang peran yang dimiliki.

Usman (2006: 6) menyebutkan “jabatan guru memangku tiga jenis tugas yakni, tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas guru dalam kemasyarakatan”. Artinya, dalam kapasitas sebagai jabatan profesi, guru bertugas untuk mendidik, mengajar, dan melatih. Sedangkan tugasnya dalam misi kemanusiaan, meliputi bahwa guru bisa menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua bagi anak didiknya selama di lingkungan sekolah. Para guru mampu menarik simpati murid-muridnya sehingga mereka menjadi idola para siswa. Adapun tugas dalam bidang kemasyarakatan merupakan komponen strategis yang memiliki peran penting dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa.

Peran guru, utamanya guru PPKn selain bertugas sebagai pengajar dalam proses belajar-mengajar selama di sekolah, mereka juga memiliki tugas lain, yakni menjadi panutan bagi para anak didik dengan kewibawaan, tanggung jawab, taat peraturan, dan lain sebagainya. Selain itu juga, guru seharusnya memiliki cara agar anak didiknya menjadi pribadi bermoral khususnya moral antikorupsi.

Namun pada kenyataannya, meskipun Pendidikan Kewarganegaraan telah ditempuh sejak Sekolah Dasar (SD) bahkan hingga Perguruan Tinggi (PT) menunjukkan bahwa pembelajaran pendidikan antikorupsi pada Pendidikan Kewarganegaraan hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan, terutama berkaitan dengan penanaman sikap dan perilaku antikorupsi pada peserta didik. Menurut Montessori (2012: 294) “pembelajaran masih terkonsentrasi pada pembentukan kognisi melalui pemberian informasi secara verbal, tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan wawasan dan nalar akan dimensi moral dari korupsi”.

Melihat pentingnya peran yang dimiliki oleh guru PPKn dalam pembentukan moral antikorupsi para peserta didik sebagai upaya pencegahan meluasnya tindak kasus pidana korupsi di Negara Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lamongan. Mengingat Lamongan sendiri tidak luput dari tindak kasus pidana korupsi baik dari kalangan bawah sampai pejabat tinggi sekalipun dengan judul **“Analisis Peran Guru PPKn Dalam Membina Moral Antikorupsi Peserta Didik (Studi Kasus Pada SMPN 2 Pucuk - Lamongan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan masalah penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran guru PPKn dalam membina moral antikorupsi peserta didik?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi guru PPKn dalam membina moral antikorupsi peserta didik?
3. Bagaimana solusi yang tepat agar peran guru PPKn membina moral antikorupsi peserta didik sesuai dengan upaya pemberantasan korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dipaparkan, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran guru PPKn dalam membina moral antikorupsi peserta didik.
2. Mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi guru PPKn dalam membina moral antikorupsi peserta didik.
3. Mengetahui peran yang tepat bagi guru PPKn dalam membina moral antikorupsi peserta didik agar selaras dengan upaya pemberantasan korupsi

D. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terfokus, oleh karena itu pembahasan penulisan ini dibatasi pada ruang lingkup pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menitikberatkan pada peran guru PPKn pada saat proses kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas.
2. Subjek pada penelitian ini adalah guru PPKn dan para peserta didik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pucuk Kabupaten Lamongan

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diketahui manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi sumber wawasan di SMP Negeri 2 Pucuk – Lamongan dalam upaya meningkatkan peran guru PPKn dalam membina moral antikorupsi para peserta didik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai rujukan guna melaksanakan penelitian selanjutnya serta mengetahui dengan lebih jelas mengenai pentingnya peran guru PPKn dalam membina moral antikorupsi peserta didik.

b. Bagi Guru

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar guru PPKn memberikan materi pembelajaran tentang pentingnya pembinaan moral antikorupsi peserta didik.

c. Bagi Siswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa perubahan bagi para siswa untuk membentuk moral antikorupsi peserta didik.

F. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka adapun peneliti mengutip penegasan istilah dari beberapa ahli yang kemudian disimpulkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis sebuah peristiwa atau keadaan berguna untuk mengetahui bagaimana peristiwa tersebut terjadi, asal – usul sebuah peristiwa akan diketahui apabila dilakukan analisis pada peristiwa tersebut.

Pengertian analisis adalah “penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)”. (Departemen Pendidikan Nasional, 2017:18).

Menurut peneliti analisis adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui seluk-beluk suatu peristiwa, analisis merupakan langkah awal dari sebuah penelitian itu sendiri.

2. Peran

Tindakan seseorang pada kedudukan atau jabatan tertentu, khususnya dalam hal ini seorang guru / pengajar berlandaskan perannya dalam mendidik atau mengajar para siswanya. Menurut Soekanto (2002: 243) menyebutkan “peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.

Peneliti memberikan pendapat bahwa peran adalah suatu tanggung jawab yang dimiliki seseorang pada jabatan atau kedudukan tertentu, di mana dalam pelaksanaannya memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri.

3. Guru PPKn

Guru merupakan pendidik / pengajar baik di dalam sekolah formal maupun informal. Uno (2017: 15) menjelaskan kriteria seorang guru sebagai berikut:

Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan.

Jadi, guru PPKn adalah orang yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing tentang Pendidikan Kewarganegaraan kepada peserta didik.

4. Moral

Menurut Zuriyah (2015: 106) menyebutkan “moral adalah sesuatu yang *restrictive*, artinya bukan sekadar sesuatu yang deskriptif tentang sesuatu yang baik, tetapi sesuatu yang mengarahkan kelakuan dan pikiran seseorang untuk berbuat baik”. Seseorang dapat dikatakan memiliki moral baik apabila ia mentaati seluruh aturan atau norma yang ada dalam lingkup masyarakat, begitu pula sebaliknya.

Moral menurut pandangan peneliti adalah sikap baik atau buruk yang dilakukan oleh orang yang berada dalam lingkungan masyarakat, ketika seseorang memilih tindakan baik atau buruk akan memiliki dampak tersendiri bagi kehidupannya dalam bermasyarakat.

5. Antikorupsi

Anti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “tidak setuju, tidak suka, tidak senang” (Departemen Pendidikan Nasional, 2017:21). Suradi (2014: 80) menjelaskan cakupan tindak pidana korupsi dalam bukunya.

Menurut ACFE, korupsi didefinisikan sebagai berikut: Korupsi (*Corruption*) adalah tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mencakup : (1) penyuapan (*bribery*), (2) konflik kepentingan (*conflict of interest*), (3) pemaksaan yang bersifat ekonomi (*economic extortion*), dan (4) pemberian secara tidak sah (*illegal gratuities*).

Disimpulkan bahwa antikorupsi adalah tindakan tidak setuju atau tidak senang dengan tindakan melawan hukum yang mencakup suap, pemberian tidak sah, dan sebagainya.

6. Peserta Didik

Peserta didik merupakan subjek dari proses belajar mengajar baik secara formal maupun informal, ada atau tidak adanya peserta didik merupakan salah satu faktor penting terhadap proses belajar – mengajar. Danim (2010: 1) menjelaskan.

Peserta didik merupakan sumber daya utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Tidak ada peserta didik, tidak ada guru. Peserta didik bisa belajar tanpa guru. Sebaliknya, guru tidak bisa mengajar tanpa peserta didik. Karenanya, kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kehadiran peserta didik sangat penting dalam pendidikan. Karena seorang guru akan mengajarkan ilmu yang dimiliki kepada para peserta didik. Apabila tidak ada peserta didik, proses pendidikan tidak dapat berlangsung.

